

# Perempuan dalam Proses Perdamaian: Perjuangan Perempuan Afghanistan Melawan Penindasan Berlapis selama Perundingan Damai

Fajarningrum Akhmady<sup>1</sup>, Nursabrina Rahmawati<sup>2</sup>, Tedy Asjad Krisnamukti<sup>3</sup>

Universitas Gadjah Mada, Indonesia

[fajarningrumakhmady@mail.ugm.ac.id](mailto:fajarningrumakhmady@mail.ugm.ac.id)<sup>1</sup>, [nursabrinarahmawati@mail.ugm.ac.id](mailto:nursabrinarahmawati@mail.ugm.ac.id)<sup>2</sup>, [tedyasjad78@gmail.com](mailto:tedyasjad78@gmail.com)<sup>3</sup>

## Abstract

The drastic changes in Afghanistan's social and political structure following the Taliban's takeover of the government in 2021 have resulted in severe oppression of women. The reimplementation of discriminatory policies has created significant challenges for Afghan women in fighting for their rights. This study aims to analyze women's struggles within the context of peace negotiations, not only in the Doha Agreement between the United States and the Taliban; which failed to address women's rights, but also in the subsequent intra-Afghan negotiations between the Taliban and the Afghan government, where women continued to face structural barriers to meaningful participation. Using a postcolonial feminist approach, this research explores the concept of "double colonization" experienced by Afghan women, where they are caught between Taliban oppression and neglect by the US. The findings reveal that while women actively engage through organizations and activism to participate in the peace process, their voices are often ignored by multiple layers of oppression. Women's participation in intra-Afghan talks remains minimal, and peace agreements do not guarantee the protection of their fundamental rights. This study underlines the importance of women's inclusion in the peace negotiation process to ensure peace for women in the form of fulfillment of rights and security after a peace agreement is reached between the conflicting parties.

**Keywords:** *Afghanista, women's rights, peace negotiations, postcolonial feminism, double colonization.*

## PENDAHULUAN

Jatuhnya pemerintahan Afghanistan pada tahun 2021 menyebabkan perubahan drastis dalam struktur sosial dan politik Afghanistan, termasuk kebijakan diskriminatif terhadap perempuan yang kembali diberlakukan dengan ketat. Sejak pengambilalihan pemerintahan oleh Taliban, perempuan Afghanistan kembali menghadapi pembatasan total dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka dilarang bekerja di sebagian besar sektor publik, dilarang bersekolah di tingkat menengah dan tinggi, serta diharuskan mengenakan *burqa* jika keluar rumah. Kebijakan-kebijakan ini mencerminkan kembalinya interpretasi konservatif Taliban terhadap hukum Islam yang kaku dan mengekang kebebasan perempuan (Human Right Watch, 2021). Taliban, dalam upaya untuk memulihkan peraturan yang sesuai dengan interpretasi mereka tentang syariah, memandang perempuan sebagai entitas yang perlu dilindungi terutama dari konsep Barat tentang hak-hak perempuan (UN Women, 2024). Situasi ini sangat memprihatinkan karena perempuan yang sebelumnya telah merasakan kebebasan relatif, kini harus kembali menghadapi kenyataan yang memlimitasi hak-hak mereka (Allen dan Felbab-Brown, 2020).

Nasib dan kedudukan perempuan ini secara signifikan dipengaruhi oleh perjanjian damai antara Amerika Serikat dan Taliban pada tahun 2020, Perjanjian Doha, yang tidak membahas masa depan perempuan dengan segala hak yang didapatkannya saat pergantian kekuasaan. Proses negosiasi damai selanjutnya antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan, yang disebut dengan Pembicaraan Damai Intra-Afghanistan pada 2021, terdapat semangat dan upaya perempuan dalam memperjuangkan hak dan representasi mereka dalam struktur kekuasaan melalui representasi. Namun, kepastian pemenuhan hak-hak perempuan sekali lagi diabaikan dengan tidak

dimasukkan dalam poin pembahasan, sementara Taliban mendapatkan konsesi besar untuk kembali ke kekuasaan tanpa komitmen nyata terhadap perlindungan hak-hak dasar perempuan (Thomas, 2020). Selain itu, meskipun perempuan hadir dalam pembicaraan ini, jumlah mereka sangat terbatas, dan suara mereka sering kali tidak didengar dengan serius oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proses negosiasi. Hal ini menunjukkan betapa marginalnya posisi perempuan dalam politik Afghanistan saat ini.

Dalam konteks historis, perempuan Afghanistan telah lama berjuang untuk memperoleh pengakuan, partisipasi, dan perlindungan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Sejak era monarki di tahun 1960-an, hingga masa pasca-perang, perempuan telah berupaya mendapatkan hak-hak yang setara. Saat era reformasi dan modernisasi, pemerintah Afghanistan memajukan hak-hak perempuan. Namun, pada era konflik dan dominasi Mujahidin pada tahun 1990-1996 hak-hak perempuan mulai terkikis. Semangat mereka dalam melawan hukum yang diskriminatif ini sering kali terbentur oleh ketidakstabilan politik dan kebijakan pemerintah terutama saat dipimpin oleh Taliban pada tahun 1996 sampai 2001. Pada periode 2001 hingga 2021 dimana Taliban terpukul mundur oleh invasi Amerika Serikat, hubungan Afghanistan dengan komunitas internasional yang didukung oleh Amerika Serikat menghasilkan beberapa kemajuan yang dicapai, terutama dalam hal pendidikan dan pekerjaan bagi perempuan. Namun, meskipun telah ada sedikit perubahan positif, perempuan Afghanistan tetap menghadapi diskriminasi struktural yang mendalam, dan sering kali dikecualikan dari keputusan politik yang menyangkut kehidupan mereka sendiri (Bijlert, 2021).

Laporan, penelitian, dan dokumentasi mengenai semangat dan gerakan perempuan Afghanistan dalam memperjuangkan hak-hak mereka menjadi sangat penting untuk memahami dinamika perubahan sosial, strategi advokasi, dan tantangan yang mereka hadapi dalam konteks perpolitikan Afghanistan kontemporer. Dalam hal ini, penting untuk menyoroti bagaimana perempuan Afghanistan berusaha mempertahankan akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan di tengah dinamika konflik, terutama saat perundingan-perundingan damai dilakukan. Penelitian ini mengidentifikasi semangat serta upaya kontribusi yang dilakukan oleh perempuan Afghanistan, baik secara individu maupun kelompok. Fenomena ini menuntut reinterpretasi feminisme dalam ideologi dan praktik yang mampu memahami keberagaman pengalaman perempuan di berbagai konteks sosial-politik. Sebagaimana dikemukakan oleh Rachman (2023) dalam kajian feminisme, penting untuk melihat feminisme tidak hanya sebagai gerakan yang universal, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan kondisi lokal yang berbeda dan menghadapi tantangan struktural yang unik. Situasi perempuan Afghanistan yang menghadapi represi dan pembatasan hak menunjukkan perlunya pendekatan feminis yang inklusif dan kontekstual, yang mempertimbangkan realitas sosial dan politik yang kerap kali ditemui perempuan di wilayah konflik. Nasib perempuan Afghanistan sangat dipengaruhi oleh proses politik yang membatasi partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam perundingan damai yang masih didominasi oleh kekuatan patriarki dan pendahuluan kepentingan keamanan nasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gerakan perempuan Afghanistan sebelum dan di saat masa perundingan damai. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan untuk menganalisis kondisi yang dialami oleh perempuan Afghanistan yang berusaha memperjuangkan pemenuhan hak-hak mereka melalui keterwakilan dalam masa perundingan damai di Doha antara Amerika Serikat dan Afghanistan serta Perjanjian Damai Intra-Afghanistan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai partisipasi perempuan dalam perundingan damai menggunakan kerangka *Women, Peace and Security* (WPS) (Bell dan O'Rourke, 2010; George dan Shepherd, 2016; Cobar, Bjerten-Günther, dan Jung, 2018). Namun, meski WPS telah mendorong peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian (Bell dan O'Rourke, 2010), perempuan masih menghadapi tantangan untuk berkontribusi mewujudkan perdamaian seperti yang dialami oleh perempuan Afghanistan.

Pendekatan patriarki khususnya tawar-menawar patriarki atau *patriarchal bargaining* digunakan untuk melihat absennya perempuan dalam dinamika kekuatan gender (Aggestam dan True, 2021) seperti dalam perundingan damai yang terjadi di Afghanistan (Akbari dan True, 2024). Namun, tidak hanya patriarki yang menjadi tantangan untuk mewujudkan partisipasi perempuan yang aktif dalam perundingan damai. Di Afghanistan, perempuan terjebak dalam penindasan berlapis, yang bukan hanya paham patriarki saja yang menindasnya, tetapi juga kekuatan pendudukan yang mengutamakan kepentingannya. Perempuan Afghanistan menurut Moghadam (2005) terperangkap di antara negara lemah, kekuatan negara yang melakukan pendudukan (AS), kelompok oposisi bersenjata, serta pengaturan gender yang patriarki. Bahkan upaya yang dilakukan oleh AS dalam promosi hak-hak perempuan selama invasi yang dilakukannya mulai tahun 2021 membentuk penindasan jenis baru terhadap perempuan (Puspita et al, 2024). Sehingga penelitian ini ingin mengisi gap penelitian tentang kondisi perempuan Afghanistan dalam perundingan damai yang ternyata berpengaruh terhadap nasib perempuan dalam upaya perdamaian menggunakan kerangka feminisme pasca-kolonial.

Perempuan di negara terjajah kerap kali mengalami penindasan berlapis, baik dari pihak penjajah maupun dari ketidakadilan gender dalam masyarakat, disebut sebagai *double colonization* yang merupakan sebuah konsep dalam kajian feminisme pasca-kolonial (Spivak, 2010). Meskipun kemudian dalam berbagai penelitian kritik sosial yang menjelaskan mengenai fenomena ini; yang kemudian dikenal dengan feminisme pasca-kolonial, berlatar belakang pada fenomena penjajahan bentuk lama, penelitian ini melihat pola yang serupa muncul pada fenomena penjajahan jenis baru. Invasi Amerika Serikat ke Afghanistan, diikuti dengan pembentukan pemerintahan 'ideal' menurut standar Barat serta pembangunan yang kerap tidak selaras dengan konteks sosial-budaya Afghanistan, dipandang sebagai bentuk kolonisasi bentuk baru, neo-kolonial. Melalui penelitian ini akan dijelaskan mengenai kondisi perempuan Afghanistan dalam perjuangannya untuk mewujudkan perdamaian setelah AS menarik pasukannya dari Afghanistan.

## METODE PENELITIAN

Artikel ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan serta memahami fenomena, aktivitas serta proses sosial. Data diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*), mengumpulkan data serta materi dari literatur yang relevan dengan topik yang diangkat. Beberapa contoh literatur yang digunakan adalah artikel jurnal, laporan, buku, serta situs berita resmi. Teknik analisis data deduktif digunakan untuk meneliti data yang berkaitan dengan fenomena penelitian melalui teori yang dipilih. Sehingga teori akan digunakan sebagai bahan dasar analisis dalam penelitian yang kemudian membentuk hipotesis. Teori yang digunakan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan penelitian adalah teori feminisme pasca-kolonial.

## KERANGKA KONSEPTUAL

### A. Feminisme Pasca-kolonial

Perspektif feminisme pasca-kolonial bertujuan untuk memberikan kesempatan dan suara pada perempuan yang selama ini menjadi objek dari dominasi kolonial yang juga berkelindan dengan patriarki. Jika menggunakan istilah dari Gayatri C. Spivak (2010), perempuan di negara ketiga atau negara bekas jajahan mengalami kondisi "*double oppressed*" atau "*double colonization*". Dalam esainya, '*Can the Subaltern Speak?*' Spivak mempertanyakan mengenai perempuan yang menjadi objek dari kolonialisme dan dari konstruksi gender yang masih memberikan label lebih dominan kepada laki-laki, alih alih mempertanyakan partisipasi peran perempuan dalam perjuangan pemberontakan atau aturan dasar mengenai pembagian kerja berdasarkan pada gender (Spivak, 2010). Penindasan berlapis yang dialami oleh perempuan ini tentunya akan berdampak pada posisinya yang terabaikan dalam politik hingga sosial ekonomi.

Pendefinisian lain dari feminisme pasca-kolonial adalah bentuk eksplorasi atas interseksi kolonialisme dan neokolonialisme terhadap gender, bangsa, kelas, ras dan seksualitas dalam konteks yang berbeda di kehidupan, pekerjaan subjektivitas, seksualitas dan hak (Rajan dan Yo-me, 2000). Perspektif ini mencoba membuka pembahasan mengenai penindasan perempuan di dunia ketiga atau di bekas negara jajahan yang selama ini dibahas dalam perspektif feminisme dan pasca-kolonial secara terpisah. Perspektif pasca-kolonial mendapatkan kritikan karena dinilai terlalu *male-centric approach*, seperti kritik terhadap pandangan Sartre mengenai kekerasan dalam sistem kolonial berlandaskan pada subjektivitas para laki-laki yang berada dalam sistem kolonial sekaligus mengabaikan penjelasan mengenai bagaimana perbedaan gender dan segala perilaku yang didapatkan oleh perempuan sebagai 'subjek' dalam sistem kolonialisme (Nya, 2015). Gender adalah hal yang seringkali luput dalam pembahasan para teoritis pasca-kolonial, seperti Sartre, karena fokus pembahasannya seringkali berputar pada pembebasan wacana kolonialisme yang merepresentasikan mereka yang terjajah, dan dominannya adalah laki-laki dari label inferior (Tyagi, 2014).

Perspektif feminisme pasca-kolonial ini menentang feminisme barat yang berasumsi bahwa semua perempuan di dunia menghadapi penindasan yang serupa karena gender mereka. Para feminis barat juga kerap salah dalam merepresentasikan apa yang perlu 'dibebaskan' serta apa faktor yang 'menindas' para perempuan negara dunia ketiga atau bekas negara jajahan. Helen Carby berpandangan bahwa para feminis barat kerap kali terjebak dalam bias etnosentris mengenai solusi yang selama ini dibangun dan ditawarkan saat memerangi penindasan dapat diaplikasikan untuk seluruh kasus penindasan perempuan dengan menghiraukan konteks sosial, sejarah dan budaya saat mencoba untuk menyusun rencana perjuangan melawan penindasan dan pengabaian hak perempuan. Seperti saat feminisme barat melihat bahwa cara untuk berjuang melawan penindasan yang dialami oleh perempuan kulit hitam adalah dengan mempersatukan seluruh perempuan melawan laki-laki, tetapi para perempuan kulit hitam melihat bahwa perjuangan mereka tidak bisa sesederhana itu karena mereka juga memiliki kekhawatiran mengenai rasisme dan perlu bersatu bersama para laki-laki kulit hitam untuk melawan diskriminasi ras tersebut (Tyagi, 2014).

Fenomena *double-colonization* pada perspektif feminisme pasca-kolonial digunakan untuk memperlihatkan kondisi perempuan Afghanistan dalam periode pembicaraan damai. Mereka terjebak dalam posisi terabaikan haknya karena konstruksi gender yang melekat pada bagaimana Taliban memandang perempuan serta pada bagaimana kondisi dan nasib perempuan Afghanistan setelah Amerika Serikat keluar dari Afghanistan, yang tidak menjadi prioritas dalam agenda pembahasan perjanjian damai antara Taliban dan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari bagaimana pemerintah Amerika Serikat memprioritaskan aspek keamanan nasional negara dan pasukannya melalui fokus perundingan kontra-terorisme dan gencatan senjata dalam poin kewajiban yang harus dipenuhi oleh Taliban saat negara tersebut memutuskan untuk keluar dari pusaran konflik di Afghanistan, dibandingkan memasukkan poin pemastian peran perempuan Afghanistan dalam partisipasi politik dan penjaminan hak dalam pendidikan hingga bekerja. Disisi lain, Taliban yang memiliki rekam jejak dalam menegakkan aturan yang mendiskriminasi perempuan tidak memberi kesempatan kepada perempuan untuk ikut andil dalam perundingan hingga kesepakatan damai dengan Amerika Serikat. Hal ini menyebabkan dalam setiap poin yang dibahas dan ditetapkan tidak adanya penjaminan terhadap keberlanjutan aturan yang memberikan kebebasan kepada perempuan saat kelak Taliban ikut serta menjadi bagian dalam pemerintahan Afghanistan.

## PEMBAHASAN

### Upaya Perempuan Afghanistan Untuk Memperjuangkan Kesejahteraan yang Berkelanjutan dalam Perundingan Damai: Pra-Perundingan Damai

Pada tahun 2018, aktivisme perempuan Afghanistan dalam memperjuangkan keterlibatan mereka di perundingan damai dilakukan melalui berbagai organisasi, aktivisme individu, dan kolaborasi lokal-internasional. Jaringan yang kompleks ini menunjukkan tekad perempuan Afghanistan untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian dan melindungi hak-hak mereka. Dalam bentuk aktivisme kelompok, beberapa organisasi perempuan Afghanistan mengambil peran utama dalam aktivisme selama pra-perundingan damai. Aktivisme kelompok pertama dilakukan oleh Afghan Women's Network (AWN) yang merupakan jaringan aktivis perempuan terbesar di Afghanistan dengan mewakili lebih dari 120 organisasi hak-hak perempuan. Pada tahun 2018, AWN memimpin kampanye kesadaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih perempuan dalam pemilihan parlemen bulan Oktober. Mereka mengadvokasi keterlibatan perempuan Afghanistan dalam perundingan damai dan memobilisasi perempuan di seluruh negeri untuk mengakui dampak perundingan terhadap hak-hak mereka (Ahmadi dan Nahavandi, 2018).

Women for Afghan Women (WAW) menjadi aktivisme kelompok kedua yang memiliki kehadiran signifikan di Afghanistan dan Amerika Serikat. Pada tahun 2018, WAW menyelenggarakan pertemuan masyarakat dan menyediakan platform bagi perempuan Afghanistan untuk menyuarakan keprihatinan mereka tentang perundingan perdamaian dengan Taliban. Organisasi ini mengadvokasi secara internasional, meningkatkan kesadaran tentang potensi kemunduran hak-hak perempuan, dan mencari dukungan dari para pembuat kebijakan AS untuk memastikan representasi perempuan Afghanistan dalam perundingan perdamaian (Feminist Majority Foundation, 2018). Selain itu, terdapat aktivisme kelompok yang dilakukan oleh Afghan Women's Education Center (AWEC), di mana berfokus pada pemberdayaan perempuan Afghanistan melalui pendidikan dan pengembangan kepemimpinan. Pada tahun 2018, AWEC mengadakan lokakarya yang mendidik perempuan tentang implikasi dari proses perdamaian dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam ranah politik secara aktif. Pekerjaan mereka meluas hingga ke daerah pedesaan, memastikan bahwa perempuan dari berbagai latar belakang dapat berkontribusi pada diskusi tentang perdamaian dan representasi.

Aktivis individu juga mengambil peran pribadi dalam advokasi representasi perempuan Afghanistan dalam perundingan perdamaian dengan menggunakan pengaruh mereka untuk menyerukan inklusivitas. Pertama, Sima Samar yang merupakan ketua Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan. Samar merupakan seorang advokat untuk hak-hak perempuan dalam konteks perundingan damai. Dia menghadiri berbagai forum nasional dan internasional, menekankan bahwa ketidakhadiran perempuan dalam diskusi perdamaian akan melemahkan kesepakatan apa pun yang dicapai. Keterlibatan Samar yang menonjol membuat isu-isu perempuan Afghanistan tetap menjadi yang terdepan dalam percakapan ini (Feminist Majority Foundation, 2018). Kemudian, Fawzia Koofi yang merupakan seorang mantan anggota parlemen Afghanistan dan advokat hak-hak perempuan yang vokal, Koofi vokal tentang risiko terhadap hak-hak perempuan jika Taliban diberi kekuasaan tanpa perlindungan yang tepat. Ia secara konsisten berpendapat bahwa perdamaian yang berkelanjutan harus menyertakan perspektif perempuan Afghanistan. Keterlibatan internasionalnya menggarisbawahi pentingnya proses perdamaian yang melibatkan semua warga negara Afghanistan. Lalu, Habiba Sarabi yang merupakan gubernur

provinsi perempuan pertama di Afghanistan, Sarabi berupaya mengamankan hak-hak perempuan Afghanistan dalam setiap perjanjian perdamaian yang potensial. Ia berpartisipasi dalam proses perdamaian sebagai advokat yang mendorong perlindungan struktural bagi perempuan. Kehadiran Sarabi merupakan simbol penting ketahanan dan keterlibatan politik perempuan, yang semakin memperkuat pesan bahwa perempuan adalah kontributor penting bagi masa depan Afghanistan (Feminist Majority Foundation, 2018).

Selain melalui aktivisme kelompok dan individu, kelompok perempuan Afghanistan juga sering kali berkolaborasi dengan organisasi internasional, menggunakan kemitraan ini untuk memperkuat suara mereka dan mendapatkan dukungan yang lebih luas. Afghan Women's Network (AWN) dan United States Institute of Peace (USIP) bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan dan kerangka kerja yang mengadvokasi keterlibatan perempuan Afghanistan. Melalui konferensi dan diskusi, USIP membantu menyuarakan suara perempuan Afghanistan kepada khalayak internasional, yang memperkuat pentingnya peran perempuan dalam proses perdamaian yang inklusif (Feminist Majority Foundation, 2018). Lalu, Women for Afghan Women (WAW) dan Georgetown Institute for Women, Peace, and Security bekerja sama untuk mendokumentasikan risiko yang dihadapi perempuan Afghanistan dalam proses perdamaian dan mengadvokasi perlindungan yang lebih kuat dalam perjanjian perdamaian. Kemitraan ini membantu meningkatkan kesadaran di kalangan anggota parlemen AS dan badan-badan internasional, memastikan bahwa hak-hak perempuan Afghanistan dipandang penting bagi perdamaian yang langgeng (Bjelica et al., 2018).

Aktivisme melalui media sosial juga digalakkan oleh perempuan yang salah satunya adalah #MyRedLine. Kampanye #MyRedLine diluncurkan pada bulan Maret 2019 oleh Farahnaz Forotan yang mengadvokasi para pembuat keputusan Afghanistan bahwa perdamaian tidak dapat dicapai dengan mengorbankan hak, kebebasan, dan kebahagiaan perempuan (UN Women: Asia and the Pacific, 2019). Kampanye tersebut menghasilkan 30 video yang dilakukan di tengah upaya AS untuk merundingkan perdamaian dengan Taliban. Salah satu video menampilkan beberapa perempuan dan laki-laki muda Afghanistan yang menggambar garis merah mereka yang menyimbolkan batasan akan pokok-pokok demokrasi seperti pendidikan, kebebasan berbicara, dan kesetaraan gender (Najibullah, 2019). Kampanye ini menjadi bentuk respon pembela hak-hak perempuan atas kekhawatiran bahwa kembalinya Taliban ke tampuk kekuasaan akan mengancam kebebasan yang diperoleh perempuan Afghanistan.

### **Upaya Perempuan Afghanistan untuk Memperjuangkan Kesejahteraan yang Berkelanjutan dalam Perundingan Damai: Periode Perundingan Damai**

Selama periode perundingan damai Amerika Serikat-Taliban antara tahun 2018 dan 2020, partisipasi perempuan Afghanistan menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam perundingan langsung antara Amerika Serikat dan Taliban, perempuan Afghanistan tidak dilibatkan secara formal sebagai negosiator, meskipun telah ada upaya advokasi dari organisasi seperti Afghan Women's Network dan pemimpin perempuan seperti Palwasha Hassan yang dilakukan sebelum periode perundingan damai. Pengecualian ini menimbulkan kekhawatiran luas tentang potensi pembatalan hak-hak perempuan berdasarkan perjanjian apa pun dengan Taliban. Padahal banyak aktivis perempuan Afghanistan, pemimpin masyarakat sipil, dan mitra internasional menekankan perlunya suara perempuan dalam proses perdamaian.

Walaupun perempuan dikecualikan saat perundingan Amerika Serikat-Taliban, mereka memperoleh representasi namun porsi terbatas dalam perundingan intra-Afghanistan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan yang dimulai di Doha pada September 2020. Pemerintah Afghanistan menunjuk empat negosiator perempuan, termasuk Fawzia Koofi, Dr. Habiba Sarabi, Fatima Gailani, dan Sharifa Zurmati Wardak, ke dalam tim yang beranggotakan 21 orang. Melalui penunjukan tersebut mengindikasikan hanya 19% representasi perempuan dalam perundingan intra-Afghanistan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan (Qazi, 2020). Berbanding terbalik dengan pihak Taliban yang tidak memiliki delegasi perempuan sama sekali.

Mereka berasal dari latar belakang dan pengalaman hidup yang berbeda, dan benang merah yang menghubungkan mereka adalah perjuangan mereka untuk hak atas pendidikan. Fawzia Koofi, Dr. Habiba Sarabi, Fatima Gailani, dan Sharifa Zurmati Wardak. Fawzia Koofi menekankan bahwa ia merasa memiliki tanggung jawab besar untuk mewakili perempuan Afghanistan agar mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik walaupun tantangan, kegugupan, dan kewalahan membayangi dalam upaya perundingan yang menandakan perubahan sistemik (Qazi, 2020). Lalu, Dr. Habiba Sarabi Taliban menekankan bahwa bukan saatnya untuk berperang melainkan saatnya menekankan dialog agar generasi muda dari kedua belah pihak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia juga memiliki perhatian pada budaya patriarki yang kental masih dapat menghalangi anak perempuan untuk mencapai potensi penuh mereka, sehingga perlu mengubah moralitas laki-laki terhadap perempuan (Qazi, 2020). Kemudian, Fatima Gailani menekankan keprihatinan akan pentingnya pendidikan dan mengancam penutupan sekolah dan universitas selama pemerintahan Taliban (Qazi, 2020). Terakhir, Sharifa Zurmati Wardak yang menekankan bahwa sebagai bagian dari tim negosiasi, ia ingin memastikan semua pencapaian yang telah diraih perempuan Afghanistan pasca-Taliban nantinya dapat dilestarikan untuk masa depan. Ia khawatir pencapaian yang telah diperoleh dengan susah payah akan terhapus jika Taliban kembali berkuasa, tetapi ia yakin bahwa kehadiran mereka di meja perundingan dapat tanda kemajuan (Qazi, 2020).

Para perempuan ini merupakan advokat penting yang menjaga hak-hak perempuan Afghanistan. Meskipun diikutsertakan, para negosiator perempuan menghadapi hambatan signifikan dalam upaya mempengaruhi diskusi. Fawzia Koofi, misalnya, mencatat bahwa partisipasinya terkadang dianggap sebagai simbolis atau sebagai provokasi politik oleh pemerintah Afghanistan, alih-alih upaya tulus untuk melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, mereka menghadapi perlawanan yang mana Koofi menjadi sasaran upaya pembunuhan, menyoroti bahaya yang dihadapi oleh aktivis perempuan di Afghanistan (Center for Preventive Action: Council on Foreign Relations, 2020).

Di daerah, pemimpin perempuan Afghanistan seperti Palwasha Hassan juga berperan aktif mengadvokasi hak-hak perempuan. Hassan menggunakan nilai-nilai Islam untuk menciptakan dialog dengan pemimpin Taliban di wilayah yang dikuasai Taliban. Namun, upaya mereka untuk membangun dialog perdamaian lokal dan advokasi hak-hak perempuan tetap diabaikan (Keller, 2020). Keterlibatan perempuan dalam perundingan damai diyakini dapat menghimpun strategi perdamaian yang holistik serta menjangkau kebutuhan semua orang karena perempuan dinilai peka terhadap situasi dominasi serta diskriminasi. Kontribusi perempuan dalam negosiasi damai berdasarkan laporan UN Women juga akan menurunkan kegagalan bina damai sebesar 64% yang diikuti dengan ketahanan politik selama kurang lebih lima belas tahun (Andris dan Tambunan, 2023).

Pemerintah Afghanistan dan Taliban juga dipertemukan kembali dalam *Moscow Talks* pada tahun 2021 dan hanya satu representasi perempuan dalam ruangan tersebut, Dr. Sarabi. Representasi Dr. Sarabi sebagai satu-satunya perempuan, dari keseluruhan 12 delegasi pemerintah dan politis Afghanistan, dinilai cukup sebagai seseorang yang mewakili perempuan Afghanistan oleh penyelenggara negosiasi (Akbari and True, 2024). Dr. Sarabi dalam pembicaraan di Moskow menuntut seluruh pihak, baik pihak pemerintah, politisi dan Taliban, untuk memberikan ruang bagi perempuan agar dapat berkontribusi dalam perdamaian (Hakimi and Greenfield, 2021). Pihak yang diikutsertakan dalam pembicaraan di Moskow ini adalah para aktor perang, yang memiliki kekuatan militer, politik, dan ekonomi, dan perempuan dikecualikan dalam pembicaraan-pembicaraan tentang perdamaian karena dianggap bukan sebagai aktor perang (Salahuddin, 2021). Hal ini memperlihatkan pemahaman bahwa hanya mereka yang berperang yang bisa menciptakan perdamaian.

Berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan mengenai representasi perempuan Afghanistan pada masa pra-perundingan damai, terdapat upaya aktivisme perempuan Afghanistan untuk membongkar hambatan hukum dan kelembagaan guna mendukung keterlibatan mereka dalam perundingan damai. Organisasi-organisasi perempuan Afghanistan seperti AWN dan WAW juga ikut serta mengadvokasi reformasi hukum dan kebijakan untuk mengikutsertakan mereka dalam perundingan damai guna dapat menyuarakan hak-hak perempuan, menunjukkan bagaimana perubahan struktural diperlukan untuk memberdayakan perempuan sepenuhnya (Feminist Majority Foundation, 2018). Kemudian, pada masa perundingan damai terdapat upaya advokasi oleh aktivis perempuan seperti Fawzia Koofi dan Habiba Sarabi dalam pembicaraan intra-Afghanistan. Bentuk-bentuk aktivisme, baik melalui pengorganisasian akar rumput, individu, atau kolaborasi internasional, menunjukkan semangat perempuan Afghanistan untuk membentuk masa depan negara mereka. Upaya terkoordinasi memastikan bahwa perspektif perempuan Afghanistan terwakili di lingkungan lokal dan global, menyoroti ketahanan mereka dalam mengadvokasi proses perdamaian yang inklusif.

## **Penindasan Berlapis yang Dialami Perempuan Afghanistan pada Masa Perundingan Damai**

### ***Diskriminasi oleh Amerika Serikat***

Surat terbuka dari Taliban dengan susunan kata yang meyakinkan menjadi hal yang sulit untuk diabaikan oleh Amerika Serikat perihal kesiapannya untuk memasuki fase perbincangan damai. Selaras dengan hal tersebut, pada tahun 2018, Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, menawarkan kepada Taliban untuk diadakan perbincangan damai dengan pemerintah sekaligus memberikan pengakuan sebagai partai politik dan pengampunan kepada para tentaranya. Hal ini ditolak oleh Taliban karena mereka melihat bahwa saat itu Afghanistan sedang dalam kondisi terjajah dan pemerintahan Afghanistan bukan pemerintahan yang sah sehingga negosiasi hanya dilakukan dengan pihak yang melakukan penjajahan, Amerika Serikat. Taliban tidak ingin membuka komunikasi damai dengan pemerintah Kabul hingga mereka mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat. Perbincangan pun dilakukan dengan hanya melibatkan Taliban dan tidak mengikutsertakan pemerintah Afghanistan dalam negosiasi damai yang dimulai tahun 2018 hingga penandatanganan kesepakatan damai tahun 2020. Negosiasi antara Amerika Serikat dengan Taliban yang dinarasikan sebagai *peace talks* sebenarnya merupakan kesepakatan pelepasan



kekuatan eksternal pendukung rezim Afghanistan dan berimplikasi pada konflik yang membuat masyarakat Afghanistan tidak merasakan perdamaian, tema utama dalam negosiasi.

Perundingan damai AS-Taliban tidak menyinggung masa depan pemerintahan dan penjaminan bentuk pemerintahan demokratis yang selama lebih dari dua dekade ini membawa banyak perubahan positif kepada nasib dan keadaan perempuan Afghanistan. Hal ini tercermin dalam kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Taliban yang ditandatangani pada tahun 2020 yang seluruh poin kesepakatannya mencerminkan kepentingan penjaminan keamanan negara dan pasukannya di Afghanistan melalui kontra terorisme dan gencatan senjata. Berikut 4 poin yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perundingan AS dan Taliban (U.S. Department of State, 2020);

1. Terdapat jaminan dan mekanisme penegakan serta pencegahan penggunaan tanah Afghanistan oleh kelompok maupun individu yang memiliki tujuan untuk mengancam keamanan Amerika Serikat dan sekutunya.
2. Amerika Serikat mengeluarkan penjaminan, mekanisme, serta tenggat waktu penarikan seluruh pasukannya dari Afghanistan.
3. Negosiasi antara Taliban dengan pihak-pihak Afghanistan, pemerintahan Afghanistan, yang disebut dengan negosiasi intra-Afghanistan akan dilaksanakan pada 10 Maret 2020.
4. Gencatan senjata permanen serta komprehensif akan menjadi agenda dalam negosiasi intra-Afghanistan bersamaan dengan kesepakatan mengenai peta jalan politik masa depan Afghanistan.

Dalam upaya kontra-terorisme, Taliban akan menjamin dan melarang penggunaan tanah Afghanistan oleh kelompok atau individu yang merupakan ancaman keamanan bagi Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Al-Qa'eda yang akan menggunakan tanah Afghanistan untuk mengancam keamanan AS dan sekutunya. Sedangkan dalam poin kesepakatan gencatan senjata, yang juga menjadi bahasan utama di negosiasi intra-Afghanistan, Amerika Serikat berusaha memastikan keselamatan tentaranya selama masa setelah penandatanganan kesepakatan hingga penarikan pasukan. Keseluruhan isi kesepakatan berputar pada kepastian keluarnya pasukan Amerika Serikat di Afghanistan serta penjaminan keamanan nasional Amerika Serikat dan pasukannya selama masa penarikan pasukan di Afghanistan. Selain itu masa depan politik pemerintahan Afghanistan juga diberikan perhatian khusus dalam negosiasi AS dan Taliban untuk dibahas di negosiasi intra-Afghanistan. Negosiasi ini membahas penentuan siapakah yang akan berkuasa dan kesepakatan bentuk pemerintahan Afghanistan antara rezim Ghani dan Taliban.

Kesepakatan Doha atau *Comprehensive Peace Agreement* antara Taliban dan Amerika Serikat yang berhasil ditandatangani di Doha, dihadiri oleh beberapa perwakilan dari banyak negara seperti Jerman, Inggris, Indonesia, Qatar, Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Norwegia, Turki, Oman, dan Pakistan, tetapi tidak melibatkan pemerintah Afghanistan yang notabene mempunyai peran penting dalam perwujudan perdamaian pasca berakhirnya konflik (Mazrieva, 2020). Hal ini membuat pembicaraan damai ini seakan menempatkan Taliban dalam posisi lebih diuntungkan dengan menghiraukan pemerintah Afghanistan, pemerintahan resmi, guna memastikan terjaminnya kepastian gencatan senjata dan kondisi damai saat keluarnya pasukan Amerika Serikat dari Afghanistan, hal yang paling ingin dicapai oleh Amerika Serikat dalam perjanjian damai ini. Menurut Samad dalam penelitian yang dilakukan oleh Alina Malik (2020), perselisihan yang mendalam antara rezim Afghanistan kala itu dengan Taliban bisa jadi alasan tidak diikutsertakannya pemerintah Afghanistan dalam negosiasi. Sehingga hal ini berimplikasi pada

ketidakstabilan kesepakatan yang di kemudian hari menjadi kesulitan bagi pemerintah Afghanistan untuk merealisasikannya, seperti perilsan tahanan politik atau tempur Taliban yang berjumlah 5000 orang yang sulit direalisasikan oleh pemerintah Afghanistan karena alasan stabilitas keamanan (Malik, 2020).

Konteks apa saja yang dirumuskan dalam perjanjian damai serta siapa saja yang menghadiri hingga merumuskan perundingan damai adalah faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan dan rekonstruksi perdamaian pasca perang termasuk siapa saja yang mendapat keuntungan dari kesepakatan damai tersebut (Molloy, 2023). Poin yang disepakati dalam perjanjian antara Amerika Serikat dengan Taliban berfokus pada konteks penjaminan keamanan AS, begitu juga dengan poin yang didorong untuk menjadi bahasan utama dalam negosiasi intra-Afghanistan, tentang konteks keamanan dan politik pemerintahan Afghanistan. Pada masa pemerintahan Obama, Hillary Clinton yang saat itu menjabat sebagai Menteri Luar Negeri mengumumkan tentang pra-kondisi negosiasi Amerika Serikat dengan Taliban, yang salah satunya adalah komitmen terhadap pemenuhan hak perempuan Afghanistan (Allen dan Felbab-Brown, 2020). Namun beberapa tahun kemudian saat perundingan damai dilaksanakan, poin tersebut tidak dimasukkan dalam pembahasan. Absennya pembahasan tentang penjaminan kesejahteraan perempuan Afghanistan membuat ketidakpastian nasib perempuan Afghanistan. Meskipun dalam konteks perjalanan perdamaian Afghanistan kemudian dijadwalkan perbincangan antara Taliban dan pemerintah Afghanistan, pembicaraan damai Intra-Afghanistan, hanya terjadi sekali dan tidak menghasilkan kesepakatan.

Dalam hal keterwakilan aktor, dalam perbincangan damai antara Taliban dan Amerika Serikat, tidak ada perwakilan dari pemerintah Afghanistan, hanya Taliban yang menjadi perwakilan masyarakat Afghanistan. Taliban tidak mengikutsertakan perempuan dalam perundingan perjanjian damai dengan Afghanistan. Tidak ada perwakilan perempuan Afghanistan dalam perundingan damai antara Taliban dan AS di tengah kenyataan AS yang merupakan negara yang meratifikasi resolusi PBB 1325 tentang Women, peace and Security (WPS) (Ahmadi, 2019). Salah satu poin penting tentang WPS adalah kontribusi perempuan dalam setiap aspek pembangunan perdamaian. Namun, bagaimana Amerika Serikat mendorong kepentingan dalam penjaminan keamanan nasional negaranya, yang dapat dilihat dari hasil perundingan yang disepakati pada bulan Februari 2020, menunjukkan bahwa Amerika Serikat mengutamakan keamanan tradisional di atas penjaminan perwujudan perdamaian bagi masyarakat Afghanistan, salah satunya bagi perempuan. AS yang menggunakan wacana pembebasan perempuan sebagai legitimasi invasinya ke Afghanistan meninggalkan para perempuan dalam kerentanan tanpa jaminan terpenuhinya hak mereka saat negara tersebut keluar dari Afghanistan.

### ***Diskriminasi oleh Taliban***

Taliban memiliki sejarah dengan kebijakannya yang diskriminatif pada saat berkuasa, dalam rentang tahun 1996-2001 melalui hukum islam atau Syariah yang berisi aturan-aturan seperti mewajibkan pemakaian burkha bagi perempuan dan pemanjangan jenggot untuk laki-laki, pelarangan penggunaan make-up, dan pemakaian sepatu hak tinggi bagi perempuan. Berbagai alasan dikemukakan oleh Taliban untuk menjustifikasi aturan Syariah yang dibuatnya meskipun kemudian alasan yang diberikan tidak masuk akal dan bertentangan dengan ajaran Islam. Tidak tersedianya fasilitas seperti sekolah dan transportasi umum yang dikhususkan untuk perempuan, dijadikan alasan untuk aturan pembatasan ruang gerak perempuan. Taliban berdalih bahwa aturan

yang mereka terapkan bertujuan untuk menjaga keamanan perempuan terutama karena masih ada laki-laki yang tidak dapat berperilaku 'layak' terhadap perempuan sehingga perempuan harus ditempatkan terpisah dari laki-laki. Para Mullah Taliban juga melihat perempuan sebagai gangguan atau distraksi dari upaya mereka untuk memenangkan setiap peperangan dengan para musuh. Bagi siapa saja yang mempertanyakan aturan Taliban, dianggap mempertanyakan agama Islam (Rashid, 2022).

Aturan yang diterapkan oleh Taliban bukan merupakan budaya Afghanistan dengan berbagai etnisitas di dalamnya, serta tidak ada standar universal atas tradisi ataupun budaya mengenai peran perempuan di masyarakat (Rashid, 2022). Meskipun Taliban adalah etnis Pashtun yang kebanyakan pemimpinnya berasal dari wilayah Selatan Afghanistan yang cukup terpencil, Afghan Pashtun bagian Timur dipengaruhi secara dominan oleh Pashtun Pakistan yang sangat bangga mengirim anak perempuannya ke sekolah. Diskriminasi terhadap perempuan, seperti tidak diberikannya akses pendidikan dan pekerjaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh Taliban bukan pula cerminan dari agama Islam karena salah satu tugas utama Rasulullah saat diutus adalah untuk melakukan emansipasi perempuan kala itu. Penindasan terhadap perempuan merupakan interpretasi Syariah yang keras untuk tujuannya 'membersihkan' masyarakat dan menjaga moral para tentaranya, bukan Islam dan budaya yang melahirkan pandangan diskriminatif terhadap perempuan (Rashid, 2022). Pendekatan yang diskriminatif terhadap perempuan ini juga dapat tercermin dalam kebijakan yang dibuat oleh Taliban di beberapa wilayah Afghanistan yang berada dalam kekuasaannya, dengan tidak memperbolehkan anak perempuan bersekolah ke jenjang pendidikan menengah (Human Rights Watch, 2020).

Konsepsi perempuan menurut Taliban tidak berubah berpuluh tahun setelahnya, dapat dilihat dari tidak adanya perwakilan perempuan Afghanistan dari pihak Taliban saat perundingan damai antara Taliban dan Amerika Serikat di tahun 2020. Perwakilan Taliban dalam negosiasi damai semua adalah laki-laki dan bahkan dalam pembicaraan damai Intra-Afghanistan, Taliban tidak membuka prospek pada perempuan untuk ikut serta dalam perundingan (Semple, 2021). Keterwakilan perempuan berasal dari pihak pemerintah Afghanistan yang kehadirannya pun tidak membawa hasil berarti bagi pembahasan hak-hak perempuan. Jika menilik dari interpretasi Taliban terhadap perempuan dan dari kebijakan terhadap perempuan pada masa pemerintahan Taliban dahulu, perwakilan perempuan sebagai negosiator yang mampu membawa bahasan mengenai kesejahteraan dan keterwakilan perempuan dalam politik diperlukan untuk meningkatkan peluang perempuan untuk mendapatkan hak-haknya pada masa pembangunan perdamaian setelah selesainya konflik. Taliban tidak memberikan ruang dan suara bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam perundingan damai bersama Amerika Serikat, begitu pula saat perundingan damai dengan pemerintah Afghanistan. Perundingan intra-Afghan pada tahun 2021 tidak menghasilkan kesepakatan apapun karena Taliban menolak gencatan senjata yang diajukan sebagai pra-kondisi oleh pemerintahan Afghanistan (Verma, 2021). Sehingga dalam perundingan Intra-Afghan, tidak ada kesepakatan mengenai jaminan terlindunginya hak-hak perempuan Afghanistan pasca AS menarik pasukannya.

Perundingan damai antara tokoh politik Afghanistan dan Taliban telah dilakukan berkali-kali di beberapa tahun sebelum tahun 2021. Dua perempuan Afghanistan ikut serta dalam dialog perdamaian yang diselenggarakan di Moskow pada tahun 2019 tidak diundang sebagai representasi dari pemerintah Afghanistan tetapi atas dasar kapasitas pribadi. Delegasi perempuan dalam perundingan damai ini tidak mencapai 1% dari keseluruhan delegasi, baik dari pihak Taliban dan

perwakilan politisi Afghanistan. Delegasi Taliban menekankan pandangan Taliban tentang perempuan Afghanistan dalam negosiasi di Moskow, bahwa perjuangan hak-hak perempuan di Afghanistan yang dimulai setelah invasi Amerika Serikat tahun 2001 telah melanggar kebiasaan Afghanistan, menimbulkan kondisi amoral serta mendorong masifnya korupsi (Ahmadi, 2019). Keputusan Taliban untuk tidak menyertakan perempuan Afghanistan dalam setiap negosiasi perdamaian serta pandangan yang diutarakan saat perundingan damai berlangsung memperlihatkan pandangan Taliban yang diskriminatif terhadap perempuan.

Perempuan Afghanistan terjebak dalam penindasan ganda selama masa perundingan damai yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik di Afghanistan. Perempuan Afghanistan tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi sebagai perwakilan dari pihak Taliban dalam perundingan damai Amerika Serikat dan Taliban maupun dalam perundingan Intra-Afghan. Hal ini dikarenakan Taliban masih melihat perempuan sebagai objek yang dapat membuat tentaranya terdistraksi sehingga para perempuan sebaiknya berada di dalam rumah dan dibatasi pergerakannya (Rashid, 2022). Interpretasi Taliban terhadap perempuan yang diskriminatif ini juga membuat tuntutan penjaminan hak perempuan diabaikan oleh Taliban dalam perbincangan damai Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Sehingga perwakilan perempuan di perundingan damai yang diselenggarakan untuk menyelesaikan konflik Afghanistan ini hanya seperti untuk memperlihatkan representasi perempuan saja tetapi substansiuntutannya tidak didengar dan dipertimbangkan.

## SIMPULAN

Pada masa perundingan damai, perempuan Afghanistan terjebak dalam kondisi penindasan ganda. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana AS yang melakukan invasi di Afghanistan sejak tahun 2001 dengan membawa kesetaraan bagi perempuan Afghanistan baik dalam pendidikan dan politik akhirnya lebih mementingkan keamanan tradisional, keamanan negaranya di atas penjaminan keberlangsungan hak-hak perempuan dalam perjanjian damai Taliban-AS. Dengan absennya representasi dan jaminan institusional, Taliban memperoleh ruang untuk kembali berkuasa tanpa kewajiban menghormati atau mempertahankan capaian hak-hak perempuan sebelumnya. Hal inilah yang menjelaskan mengapa setelah Taliban mengambil alih pemerintahan muncul begitu banyak kebijakan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan Afghanistan, karena perempuan memasuki periode pemerintahan baru tanpa perlindungan struktural, tanpa posisi tawar dalam proses politik, dan tanpa hasil konkret dari perjanjian damai yang dapat melindungi kepentingan mereka. Ditambah juga dengan kelompok Taliban yang melihat perempuan sebagai objek yang tidak dipertimbangkan sebagai partisipan dalam perundingan damai bersama Amerika Serikat maupun dengan pemerintah Afghanistan.

Nasib perempuan Afghanistan tidak dipedulikan oleh Taliban dan Pemerintah Afghanistan, dalam perundingan intra-Afghanistan, yang tercermin dari tidak adanya partisipasi perempuan dari pihak Taliban dan pembahasan yang merujuk pada inklusivitas serta penjaminan hak-hak perempuan Afghanistan. Pada masa perundingan damai berlangsung dari tahun 2018-2020 perempuan memberdayakan gerakan aktivisme baik secara individu, kelompok, maupun berjejaring dengan organisasi internasional sebagai wadah emansipasi mereka untuk menciptakan proses perdamaian yang inklusif. Tetapi sayangnya, gerakan mereka tidak menghasilkan kesepakatan serta aspirasi, dan kepentingan mereka tidak terealisasi karena mendapatkan tekanan dari dua pihak, Taliban dan AS. Hal ini bukan hal yang baru dialami oleh perempuan di

wilayah yang terjajah. Afghanistan adalah negara yang ‘terjajah’ oleh bayang-bayang AS dengan bantuan militer serta pembangunan negara melalui intervensi selama lebih dari 20 tahun yang kala itu membawa kesejahteraan bagi perempuan Afghanistan. Namun, AS mengindahkan masa depan perempuan Afghanistan saat negara tersebut berusaha mengakhiri pengaruhnya dengan keluar dari Afghanistan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aggestam, K., & True, J. (2021). *Political leadership and gendered multilevel games in foreign policy. International Affairs*, 97(2), 385–404. <https://doi.org/10.1093/ia/iaa222>
- Ahmadi, B., & Nahavandi, M. (2018). *For the Afghan Peace Process to Work, Women Must be Involved*. United States Institute of Peace.
- Ahmadi, B. (2019a). *Afghanistan Talks No Women No Peace*. United States Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2019/03/afghanistan-talks-no-women-no-peace>
- Ahmadi, B. (2019b). *usip.org-Afghanistan Talks No Women No Peace*. United States Institute of Peace. <https://www.usip.org/publications/2019/03/afghanistan-talks-no-women-no-peace>
- Akbari, F., & True, J. (2024). *Bargaining with Patriarchy in Peacemaking: The Failure of Women, Peace, and Security in Afghanistan*. *Gender Studies Quarterly*.
- Allen, J. R., & Felbab-Brown, V. (2020). *The fate of women's rights in Afghanistan*. Brookings. <https://www.brookings.edu/articles/the-fate-of-womens-rights-in-afghanistan/>
- Andris, M. F. A., & Tambunan, E. M. B. (2023). Peran Perempuan dalam Proses Bina Damai: Studi Kasus Aktivis Perempuan di Sudan Selatan (2005-2018). *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 19(1), 1–24. <https://doi.org/10.26593/jihi.v19i1.6220.1-24>
- Bell, C., & O'Rourke, C. (2010). *Peace agreements or pieces of paper? the impact of UNSC Resolution 1325 on peace processes and their agreements. International and Comparative Law Quarterly*, 59(4), 941–980. <https://doi.org/10.1017/S002058931000062X>
- Bjelica, J., & Soroush, R. (2018). *Dossier XXX: Afghan Women's Rights and the New Phase of the Conflict*. Afghanistan Analysts Network.
- Center for Preventive Action. (2020). What to Know About the Afghan Peace Negotiations-Council on Foreign Relations. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/article/what-know-about-afghan-peace-negotiations>
- Cóbar, J. A., Bjertén-günthe, E., & Jung, Y. (2018). Assessing Gender Perspectives in Peace Processes with Application to the Cases of Colombia and Mindanao. *SIPRI Insights on Peace and Security*. <http://www.un.org/>
- Feminist Majority Foundation. (2018). *Afghan Women's Right and Peace Talks*. Feminist Majority Foundation.
- George, N., & Shepherd, L. J. (2016). Women, Peace and Security: Exploring the implementation and integration of UNSCR 1325. *International Political Science Review*, 37(3), 297–306. <https://doi.org/10.1177/0192512116636659>
- Hakimi, O., & Greenfield, C. (2021, March 19). “Only woman in the room” - alarm as peace summit held with just one Afghan woman. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/world/only-woman-in-the-room-alarm-as-peace-summit-held-with-just-one-afghan-woman-idUSKBN2BB0Q7/>

- Malik, A. (2020). The Afghan Peace Agreement: Repercussions for South Asia. *NUST Journal of International Peace & Stability*, III.
- Mazrieva, E. (2020). Dorong Perdamaian di Afghanistan, Menlu RI Saksikan Penandatanganan Perjanjian AS-Taliban. *VOA Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/ikut-dorong-perdamaian-di-afghanistan-menlu-ri-saksikan-penandatanganan-perjanjian-as-taliban-/5310491.html>
- Moghadam, V. M. (2005). Peacebuilding and reconstruction with women: Reflections on Afghanistan, Iraq and Palestine. *Development*, 48(3), 63–72. <https://doi.org/10.1057/palgrave.development.1100168>
- Molloy, S. (2023). Exclusionary Inclusion? Peace Agreements and Provisions on Child Protection. *Nordic Journal of Human Rights*, 41(4), 432–451. <https://doi.org/10.1080/18918131.2023.2268997>
- Najibullah, F. (2019). *Afghan Women Drawing #MyRedLine For Peace With The Taliban*. Radio Free Europe. <https://www.rferl.org/a/myredline-the-afghan-women-who-won-t-accept-taliban-peace-at-any-cost/29972913.html>
- Nya, N. (2015). Sartre and Fanon: On Men and Women, and Gender and Race Intersection as They Relate to French Colonial Resistance. *GSTF Journal of General Philosophy (JPhilo)*, 2(1). [https://doi.org/10.5176/2345-7856\\_1.2.19](https://doi.org/10.5176/2345-7856_1.2.19)
- Puspita, K. H., Fuad, I., Tambajong, J. N., & Nuraeni. (2024). Pandangan Feminisme Poskolonial terhadap Upaya Amerika Serikat dalam Mempromosikan Hak Perempuan di Afganistan Paska 9/11. *Jurnal Hubungan Internasional*, 17(2).
- Qazi, S. (2020, October 7). Who are the Afghan women negotiating peace with the Taliban? *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2020/10/7/who-are-the-afghan-women-negotiating-peace-with-taliban>
- Rachman, A. H. (2023). Reinterpreting Feminism in Ideology and Practice. *Journal of Feminism and Gender Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.1057/fr.1986.24>
- Rajan, R. S., & You-me, P. (2000). Postcolonial Feminism/ Postcolonialism and Feminism. In H. Schwarz & S. Ray (Eds.), *A companion to postcolonial studies*. Blackwell Publishers.
- Rashid, A. (2022). *Taliban : The Power of Militant Islam in Afghanistan and Beyond* (third edition). Bloomsbury Publishing.
- Semple, M. (2021). The Taliban and the IRA. *Source: Fortnight*, 483, 19–21. <https://doi.org/10.2307/27176223>
- Spivak, G. C. (2010). Can Subaltern Speak? In R. C. Morris (Ed.), *Can the Subaltern Speak? Reflections on the History of Idea* (pp. 21–78). Colombia University Press.
- Thomas, C. (2020). *Intra-Afghan Talks Commence in Doha, Qatar*. <https://www.congress.gov/crs-product/IN11502>
- Tyagi, R. (2014). Understanding Postcolonial Feminism in relation with Postcolonial and Feminist Theories. In *International Journal of Language and Linguistics* (Vol. 1, Issue 2). [www.ijllnet.com](http://www.ijllnet.com)
- UN Women. (2024). *Summary report of countrywide women's consultations*. <https://asiapacific.unwomen.org/en/digital-library/publications/2024/07/summary-report-of-countrywide-womens-consultations-april-2024>

- UN Women : Asia and the Pacific. (2019). *#MyRedLine – A social movement cataloguing where Afghan's stand on women's rights and peace*. UN Women – Asia-Pacific. <https://asiapacific.unwomen.org/en/news-and-events/stories/2019/03/myredline>
- U.S. Department of state. (2020). *Agreement for Bringing Peace to Afghanistan between the Islamic Emirate of Afghanistan which is not recognized by the United States as a state and is known as the Taliban and the United States of America*. State Department. <https://2017-2021.state.gov/agreement-for-bringing-peace-to-afghanistan/>
- Van, M., & Afghanistan, B. (2021). *Between Hope and Fear: Rural Afghan women talk about peace and war*.